

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BITUNG

Richardo Rafael Sampow¹, Royke I. J. Pangkey²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: richardosampow21@gmail.com

Diterima : 10-11-2021 Disetujui : 29-11-2021

Abstrak

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai kesuksesan pada organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode *value for money* pada BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019, *value for money* merupakan konsep untuk mengukur kinerja berdasarkan rasio ekonomi, efisiensi, efektivitas. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari rasio ekonomi pada tahun 2016 berada pada 89,89% dikatakan cukup ekonomi dan dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 93,41%, dan 94,81%. Rasio efisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 91,67% dan 94,27% ini dikategorikan kurang efisiensi dan dikatakan tidak efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%. Rasio efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan efektif.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Abstract

Measurement of financial performance is important in achieving success in the organization. The purpose of this study was to determine the performance of financial management using the value for money method at the BKAD of Bitung City in 2016-2019, value for money is a concept to measure performance based on economic ratios, efficiency, effectiveness. Technical analysis of the data in this study is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it shows that the financial performance of the economic ratio in 2016 was at 89.89%, said to be quite economic and said to be economic in 2017, 2018, 2019 because it was at 96.23%, 93.41%, and 94.81%. . The efficiency ratio in 2016-2017 is at 91.67% and 94.27% is categorized as less efficient and is said to be inefficient in 2018-2019 because it is at 102.03% and 101.88%, respectively. The effectiveness ratio in 2017 was 106.83% said to be very effective and in 2016, 2017, and 2019 were at 95.10%, 98.43%, and 97.39% said to be effective.

Keywords: Financial Performance, Economic, Efficiency, Effectiveness

PENDAHULUAN

Kinerja yang baik merupakan suatu hal yang penting dalam setiap organisasi baik itu organisasi bisnis maupun organisasi publik yang mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan. Suatu kinerja dapat diketahui jika kelompok atau individu itu mempunyai kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan berupa target dan tujuan yang ingin dicapai (Isna, 2015). Kinerja merupakan tingkat pencapaian terlaksananya program atau kegiatan disdalam proses mewujudkan visi dan misi suatu organisasi, yang secara umum kinerja baik yang telah dicapai oleh organisasi tersebut merupakan suatu prestasi (Wira, 2014).

Kinerja keuangan sektor publik merupakan bentuk akuntabilitas dari organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan untuk semua instansi pemerintah atas penggunaan anggaran (Honga & Iliat, 2014). Kinerja suatu pemerintahan tidak dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, melainkan harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama (Wuwungan et al., 2019). Pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan karena sejak diterapkannya penganggaran yang berbasis kinerja pemerintah daerah dipaksa untuk menghasilkan suatu kinerja keuangan yang baik (Hamid et al., 2019.). Dalam organisasi sektor publik yang menjadi isu yang penting adalah pengkajian kinerja keuangan karena sejak telah ditetapkannya anggaran berbasis kinerja dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharap mampu meningkatkan kinerja keuangannya (Liando et al., 2014).

Menurut (Khalikussabir, 2017) kinerja pemerintah daerah harusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan manifestasi untuk diterima masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah harus juga bisa dipertanggungjawabkan, mengingat karena pemerintah daerah juga berkewajiban dan memiliki hak dan wewenang dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Rahayu, 2016). Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama yang digunakan untuk penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun dapat dilihat bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana prasarana, serta variabel penunjang lainnya (Fajriansyah et al., 2019). Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap keuangan daerah sering dipandang sebagai bagian yang paling krusial di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Suryantini et al., 2017).

Akuntansi sektor publik menurut (Malahika, 2018) merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan laporan tentang adanya kegiatan transaksi ekonomi yang menimbulkan terjadinya laporan untuk mempertanggungjawabkan keuangan pada suatu bidang publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut (Khalimatus Syadiah, Susanti & Rasyidi, 2016) merupakan komponen pelaporan keuangan pemerintah yang dapat memberikan informasi secara berdampingan mengenai realisasi anggaran dan entitas pelapor selama periode waktu yang ditentukan. LRA menguraikan sumber, alokasi, dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah serta memberikan perbandingan anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan.

Salah satu sistem pada era otonomi sekarang ini mencakup pengelolaan yang berkaitan dalam APBD adalah suatu standar kapan daerah bisa dikatakan mandiri, efektif, efisien, serta akuntabel (Ropa et al., 2016.). Maka untuk itu pemerintah daerah memerlukan pengukuran kinerja sebagai suatu tolak ukur dalam kebijakan penetapan keuangan daerah dalam anggaran pada tahun selanjutnya (Polii et al., 2020.).

Value for Money menurut (Mahmudi, 2018) merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. *Value For Money* menurut (Mardiasmo, 2018) merupakan konsep penting dalam pengukuran kinerja keuangan, dalam pengelolaan sektor publik mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi (hemat cermat) dalam melakukan pengadaan sumber daya, efisiensi dalam menggunakan Sumber daya dengan kata lain meminimkan

penggunaan serta dengan hasil yang maksimal serta efektif dengan arti tujuan dan sasaran. Pengukuran sangat penting dalam penilaian akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kemampuan belanja uang publik bukan sekedar kemampuan dari akuntabilitas (Mulyanigtyas, 2018).

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung bertugas dalam bidang pelayanan dan pembangunan pada masyarakat terutama dalam bidang keuangan dan aset daerah, serta berguna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, kinerja badan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bitung, yang menjadi fenomena dan permasalahan adalah berhubungan dengan anggaran yang tidak direalisasikan secara optimal sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara terget anggaran dengan realisasi anggaran dari pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2019 yang masih belum optimal. Dapat dilihat anggaran yang di telah diberikan oleh pemerintah untuk pemerintah kota Bitung selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi (tidak stabil) dan berdampak pada penyerapan anggaran yang belum maksimal karena tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menggunakan metode *value for money* dengan rasio Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam suatu penelitian kualitatif yang bisa diuji adalah datanya di mana hasil penelitian tersebut hanya berlaku bagi objek tempat penelitian dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota Bitung berdasarkan konsep *value for money*, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk pemerintah kota Bitung (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi, Dokumentasi adalah bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian secara langsung tentang kegiatan pada waktu melaksanakan survei data yang diperoleh berupa berkas-berkas yang berguna bagi peneliti.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung, Keluar Kantor Walikota, Pintu, Jl. Sam Ratulangi No.45 Kel, Bitung Tengah, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Bitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Bitung untuk Tahun Anggaran 2016 - 2019, data ini penulis dapatkan dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik ini digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan teori yang sesuai untuk masalah yang akan penulis bahas dalam melakukan perhitungan dan penyajian kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung dengan menggunakan metode *Value for money* yaitu dari rasio ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Value for money merupakan suatu konsep didalam mengelola organisasi sektor publik yang telah didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi menurut (Mahmudi, 2018) merupakan pendapatan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang paling rendah. Ekonomi merupakan suatu perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi mempunyai rumus dan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \quad (1)$$

Efisiensi menurut (Mahmudi, 2018) pencapaian output yang maksimal dengan menggunakan input yang paling terendah. Efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan yang berhubungan dengan standar suatu kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi mempunyai rumus sebagai berikut dan presentase hasil sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \quad (2)$$

Efektivitas menurut (Mahmudi, 2018) tingkat tercapainya suatu hasil program pada target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan. Efektivitas mempunyai rumus dan presentase hasil sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 1. Persentase Hasil Rasio Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Persentase	Hasil Ekonomi	Hasil Efisiensi	Hasil Efektivitas
>100%	Sangat Ekonomi	Tidak Efisiensi	Sangat Efektif
90% - 100%	Ekonomi	Kurang Efisien	Efektif
80% - 90%	Cukup Ekonomi	Cukup Efisien	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Ekonomi	Efisien	Kurang Efektif
<60%	Tidak Ekonomi	Sangat Efisien	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2018)

Tabel 1. Diatas menunjukkan hasil dari perhitungan dari masing-masing rasio yang ada dalam metode value for money yaitu: rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung

Sejarah terbentuknya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Sebelum bernama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lain-lain Kota Bitung yang menyebutkan ketentuan lebih mengenai rincian tugas khusus BPKAD Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, maka dibentuklah Badan Pengelola Keuangan dan Barang milik Daerah Kota Bitung yang disingkat BPKBMD pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pada tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019 dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut khusus Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan

Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan sekarang.

Analisis Rasio Ekonomi

Pengukuran dari rasio ekonomis yaitu berupa tingkat biaya yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam melaksanakan suatu pelayanan publik. Pengelolaan keuangan dalam tingkat ekonomis dilihat dari perbandingan antara Realisasi Anggaran Belanja dengan Target Anggaran Belanja.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

Input : Realisasi Anggaran Belanja BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Input Value : Target Anggaran Belanja BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Tabel 2. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Ekonomi Pada Tahun 2016 - 2019

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Rasio Ekonomi	Criteria
2016	779.459.099.837,00	889.342.884.605,10	89,89%	Cukup Ekonomi
2017	819.983.300.290,00	852.115.020.577,73	96,23%	Ekonomi
2018	987.421.191.731,85	1.057.034.876.340,77	93,41%	Ekonomi
2019	896.576.907.201,00	945.683.327.933,62	94,81%	Ekonomi

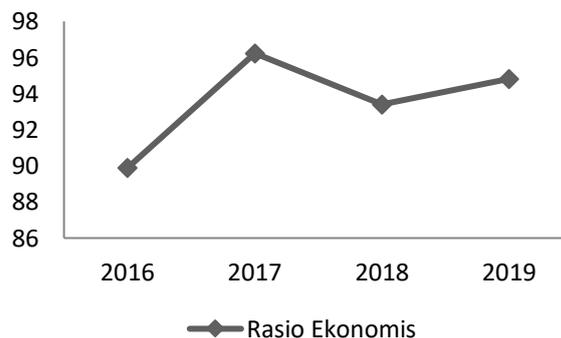
Sumber: BKAD Kota Bitung 2020 (data diolah)

Tabel 2. menunjukkan hasil perhitungan kinerja keuangan BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019 dengan menggunakan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi.

Pada tabel 2. diatas menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2016 - 2019 dalam rasio ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana jika semakin besar persentase ekonomi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. pada tahun 2016 berada pada rasio ekonomi 89,89% dimana ini dikatakan cukup ekonomi, ini menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BKAD Kota Bitung tidak terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan dalam hal ini menyisahkan perbandingan persentase sekitaran 10,11% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja berdampak pada penggunaan biaya yang kurang tepat atau program yang ada belum berjalan secara maksimal. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang mengakibatkan rasio ekonomi berada pada hasil 96,23% dimana ini dikatakan ekonomi, ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BKAD Kota Bitung hampir terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan karena menyisahkan perbandingan persentase sekitaran 3,77% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja berdampak pada penggunaan biaya yang hampir mencapai target. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang mengakibatkan rasio ekonomi berada pada hasil 93,41% dimana ini dikatakan ekonomi, ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BKAD Kota Bitung hampir terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan karena menyisahkan perbandingan persentase sekitaran 6,15%

dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja berdampak pada penggunaan biaya yang hampir mencapai target. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan yang membuat rasio ekonomi berada pada 94,81% ini dikatakan ekonomi, ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BKAD Kota Bitung hampir terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan karena menyisahkan perbandingan persentase sekitaran 5,19% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja berdampak pada penggunaan biaya yang hampir mencapai target, dan yang memberikan kontribusi yang besar pada empat tahun tersebut yaitu belanja operasional. Cukup ekonominya anggaran belanja pemerintah kota Bitung pada tahun 2016 dan ekonominya anggaran pemerintah kota Bitung pada tahun 2017, 2018, 2019 dipengaruhi oleh besarnya belanja pegawai, besarnya biaya tersebut diberikan untuk perangkat daerah sebagai bentuk imbalan karena telah melaksanakan pekerjaan dan juga sebagai pendorong yang berdampak pada peningkatan produktivitas pekerjaan para perangkat daerah, hal tersebut menimbulkan terciptanya SDM yang baik, sehingga membuat sistem tata pemerintahan yang (*good governance*).

Berdasarkan hasil analisis rasio ekonomi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kota Bitung telah mengelolah anggaran dengan cara yang ekonomi. Dikatakan ekonomi karena terkait dengan sejauh mana dapat meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan operasi organisasi, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.



Gambar 1. Grafik Rasio Ekonomis

Gambar 1. diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 berada pada rasio ekonomi 89,89%, mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 96,23%, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 93,41%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 94,81%.

Analisis Rasio Efisiensi

Pengukuran dari segi efisiensi yaitu berupa pencapaian yang maksimum dari input yang telah ditentukan atau pencapaian output tertentu dengan menggunakan input yang rendah. Efisiensi digunakan untuk membandingkan output dan input yang dihubungkan dalam standar kinerja yang telah direncanakan,

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \quad (5)$$

Keterangan:

Output : Realisasi Anggaran Belanja BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Input : Realisasi Anggaran Pendapatan BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Tabel 3. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Efisiensi Pada Tahun 2016 - 2019

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Criteria
2016	779.459.099.837,00	850.221.225.724,63	91,67%	Kurang Efisien
2017	819.983.300.290,00	869.634.357.168,04	94,29%	Kurang Efisien
2018	987.421.191.731,85	967.751.437.528,70	102,03%	Tidak Efisien
2019	896.576.907.201,00	879.999.712.108,80	101,88%	Tidak Efisien

Sumber: BKAD Kota Bitung 2020 (data diolah)

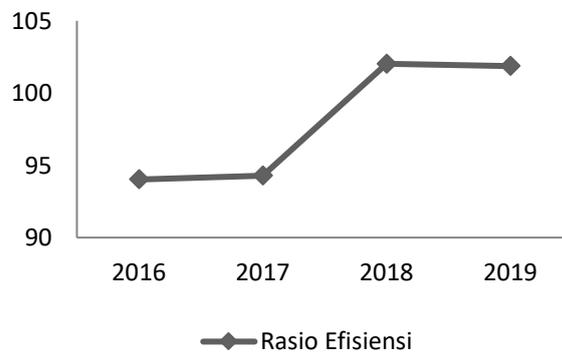
Tabel 3. menunjukkan hasil perhitungan kinerja keuangan BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019 dengan menggunakan metode *value for money* yang diukur dengan rasio efisiensi.

Pada tabel 3. diatas menunjukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2016 - 2019 dalam rasio efisiensi mengalami kenaikan pada tiga tahun dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. dimana jika semakin besar persentase efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan tidak baik. Dapat diketahui pada tahun 2016 berada pada rasio 91,67% ini dikatakan kurang efisien, pada tahun 2017 mengalami kenaikan rasio efisiensi sebesar 2,62% menjadi 94,29% hasil persentase tersebut menunjukan hasil yang kurang efisien, pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,74% kenaikan anggaran belanja yang besar tersebut mengakibatkan persentase rasio efisiensi berada pada 102,03% ini dikatakan tidak efisiensi, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang hanya sebesar 0,15% membuat berada pada persentase 101,88% ini dikatakan tidak efisiensi karena masih cukup tinggi sama seperti tahun sebelumnya yaitu berada >100% dimana seperti yang dijelaskan diatas jika semakin besar persentase rasio efisiensi maka semakin tidak efisiensinya anggaran tersebut. Kurang efisiennya anggaran pada tahun 2016 dan 2017 dan tidak efisiennya anggaran pada tahun 2018 dan 2019 dipengaruhi oleh besarnya belanja operasional walaupun dikatakan kurang dan tidak efisiensinya anggaran Kota Bitung karena tingginya belanja daerah dari pada pendapatan yang diterima daerah tersebut, hal itu dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kota Bitung karena kesejahteraan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada BKAD Kota Bitung yang menyebabkan tidak efisiennya anggaran tersebut karena terjadi pemborosan pada sektor tertentu, karena masih ada anggaran untuk pengembangan dan renovasi sementara fasilitas yang memadai sudah tersedia, hal itu terjadi karena besarnya anggaran belanja yang terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, besarnya anggaran belanja menyebabkan tidak efisiennya anggaran tersebut, belanja pegawai menjadi faktor tidak efisiennya anggaran itu hal ini dapat dilihat dari perjalanan dinas atau kegiatan rapat di luar kantor dan pengadaan kendaraan dinas baru di instansi pemerintahan.

Besarnya realisasi anggaran belanja tersebut mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.



Gambar 2. Grafik Rasio Efisiensi

Gambar 2. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 berada pada rasio efisiensi 94,02%, mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 94,29%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 102,03%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 101,83%.

Analisis Rasio Efektivitas

Pengukuran dari rasio efektivitas dapat dikatakan efektif jika organisasi programnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika pengaruh output terhadap pencapaian tujuan semakin besar kontribusinya maka organisasi tersebut dikatakan efektif dalam program dan kegiatannya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \quad (6)$$

Keterangan:

Outcome : Realisasi Anggaran Pendapatan BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Output : Target Anggaran Pendapatan BKAD Kota Bitung tahun 2016 - 2019

Tabel 4. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Pada Tahun 2016 - 2019

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Criteria
2016	850.221.255.724,63	894.060.802.521,00	95,10%	Efektif
2017	869.634.357.168,04	814.006.889.763,00	106,83%	Sangat Efektif
2018	967.751.437.528,70	983.187.829.543,00	98,43%	Efektif
2019	879.999.712.108,80	903.628.346.122,00	97,39%	Efektif

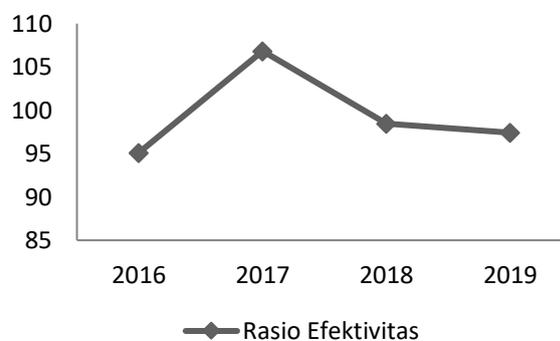
Sumber: BKAD Kota Bitung 2020 (data diolah)

Tabel 4. menunjukkan hasil perhitungan kinerja keuangan BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019 dengan menggunakan metode *value for money* yang diukur dengan rasio efektivitas.

Pada tabel 4. diatas menunjukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada tahun 2016 - 2019 dinilai berdasarkan rasio efektivitas mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana jika

semakin besar persentase efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan semakin baik. Pada tahun 2016 rasio efektivitas berada pada tingkat 95,10% hal ini dikatakan efektif karena realisasi anggarannya sudah mendekati target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 rasio efektivitas berada pada tingkat 106,8% halo ini dikatakan sangat efektif karena sudah mencapai target yang dianggarkan. Pada tahun 2018 rasio efektivitas berada pada tingkat 98,43% hal ini dikatakan efektif karena realisasi anggarannya telah mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 rasio efektivitas berada pada tingkat 97,39% hal ini dikatakan efektif karena realisasi anggarannya telah mendekati target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas tersebut diperoleh implikasi bahwa rasio efektivitas anggaran pendapatan BKAD Kota Bitung sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2016, 2018, 2019 sudah hampir mecapai target, sedangkan pada tahun 2017 sudah sangat efektif karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitasnya anggaran pendapatan BKAD Kota Bitung pada tahun 2016 - 2019 ini bisa dikatakan sangat baik karena pemerintah mampu meningkatkan dan menjaga strategi agar realisasi anggaran pendapatan bisa mencapai target yang ditetapkan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bitung.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas diatas menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang ditetapkan pemerintah kota Bitung telah tercapai. Ini dapat dilihat dari terlaksannya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, agama, ketenagakerjaan, seni budaya, pemuda dan olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. penataan kawasan tepian sungai, pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta manajemen transportasi, Peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pariwisata.



Gambar 3. Grafik Rasio Efektivitas

Gambar 3. menunjukkan bahwa pada tahun 2016 rasio efektivitas berada pada 95,10%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 106,83%, pada tahun 2018 mengalami penurunan mennjadi 98,43%, pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 97,39%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan BKAD Kota Bitung dengan Menggunakan Metode *Value For Money* adalah sebagai berikut: Dinilai dari rasio ekonomi kinerja keuangan BKAD kota Bitung berupa pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2019 dikatakan ekonomis karena pada tahun 2016 berada pada rasio 89,89% dikatakan cukup ekonomis, sedangkan pada tahun 2017-2019 berada pada rasio diantara 90%-100% ini dikatakan ekonomis. Berdasarkan data diatas pemerintah kota Bitung telah meralisasikan anggaran seminimal mungkin untuk mencapai kegiatan dan program yang telah ditentukan pemerintah kota Bitung. Dinilai dari rasio efeisiensi kinerja keuangan BKAD kota

Bitung pada tahun 2016-2017 berada pada tingkat kurang efisien, dan pada tahun 2018-2019 dinilai tidak efisien karena berada pada presentase lebih dari 100%. Berdasarkan data diatas maka pemerintah kota Bitung belum mencapai syarat efisien karena belum mencapai hasil yang maksimum dengan penggunaan dana yang minimum. Dinilai dari rasio efektivitas kinerja keuangan BKAD KOTA Bitung pada tahun 2017 berada pada tingkat presentase lebih dari 100% ini dikatakan sangat efektif, sedangkan pada tahun 2017-2019 berada pada presentase 90%-100% ini dikatakan efektif. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Bitung sudah merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Saran yang penulis sampaikan untuk BKAD kota Bitung antara lain: Dalam rasio ekonomis, BKAD kota Bitung saya sebagai penulis mengharapkan bisa menghindari pengeluaran yang kurang bermanfaat serta dapat menghemat anggaran agar dapat mencapai program dan kegiatan yang ingin dicapai. Dalam rasio efisiensi, BKAD kota Bitung saya sebagai penulis mengharapkan dapat lebih memperhatikan pengendalian dan perencanaan dari realisasi anggaran belanja karena penilaian rasio efisiensinyadikatakan mkujrang dan tidak efisien. Dalam rasio efektivitas, BKAD kota Bitung saya sebagai penulis mengharapkan dapat memeperhatikann, mempertahankan, serta meningkatkan kinerjanya bisa dapat terciptanya pengelolaan pemerintah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriansyah, Y., Elim, I., Walandouw, S. K., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2017 Analysis Of Financial Performance In Government Of Bitung City For The 2016 – 2017*. 7(3), 4465–4474.
- Hamid, A., Lamuda, I., Akuntansi, P., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, M. (2019). *Evaluation Of Financial Performance Through Approach To Value For Money Pendekatan Value For Money*. 31–41.
- Honga, A. F., & Iliat, V. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. 2(4), 278–288.
- Isna. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebig Tinngi*. 15(1), 78–85.
- Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, R. J. P. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. 13(4), 578–583.
- Khalikussabir. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pu Pengairan, Pu Binamarga & Pu Cipta Karyakabupaten Probolinggo)*. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 1–22.
- Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Riset*, 9–20.
- Liando, H. S., Paul, D., Saerang, E., & Elim, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Menggunakan Metode Value For Money*. 2(3), 1686–1694.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Uii Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publlik* (1st Ed.). Andi.
- Mulyanigtyas. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan Value For Money*. 1. [Http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive](http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive)
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). *Utara Berdasarkan Konsep Value For Money Analysis Of Financial Performance Measurement Of The North Sulawesi Provincial Government Based On The Concept Of Value For Money Jurnal Emba Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 781 -788*. 8(4), 781–788.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Rahayu, R. P. (2016). *Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan*. *Universitas Madura*, 1(01), 57–81.

- Ropa, M. O., Sam, U., & Manado, R. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. 4(2), 738–747.
- Suryantini, N. P. S., Darmayanti, N. P. A., & Candraninggrat, I. R. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali*. 32, 27–28.
- Wira, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). *Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado Gabriela*. 14(29), 354–361.